

**PERAN INSTITUSI LOKAL
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
(Studi Kasus: Proses Difusi Inovasi Produksi Pada Industri
Gerabah Kasongan Bantul, DIY)**

TUGAS AKHIR

Oleh :

**ELISA NUR RAHMAWATI
L2D000418**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

ABSTRAK

Perkembangan dan persebaran inovasi teknologi merupakan hal yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, terutama bagi wilayah dengan industri sebagai salah satu sektor unggulannya (Thee, 1997). Salah satu wilayah dengan karakter perekonomian serupa ialah Kabupaten Bantul yang memiliki fungsi strategis pendukung pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis kerajinan, salah satunya gerabah Kasongan yang merupakan salah satu 'ikon' industri dan pariwisata berharga bagi Kabupaten Bantul dan DIY. Industri kerajinan gerabah di Bantul memberikan kontribusi yang besar multiplier effect-nya bagi perkembangan perekonomian wilayah Kabupaten Bantul, baik dari segi pendapatan daerah, kinerja ekspor, serapan tenaga kerja, maupun daya tarik wisata. Oleh karenanya, untuk menghadapi kompetisi global, industri gerabah Kasongan perlu efektif mengembangkan inovasi produksinya.

Pengembangan inovasi pengetahuan dan teknologi yang efektif hanya dapat dicapai apabila semua komponen mekanisme, proses serta kelembagaan dalam institusi lokal secara kondusif mendukungnya (World Bank, 2002). Berangkat dari sana, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi peran institusi lokal dalam mendukung difusi pengetahuan dan teknologi produksi gerabah Kasongan. Disini, peran institusi lokal seluruhnya diidentifikasi melalui beberapa tahap analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap rantai hulu hilir industri gerabah Kasongan; berbagai macam proses difusi inovasi pengetahuan dan teknologi produksi gerabah; jenis institusi lokal dan pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya; serta perannya dalam mendukung difusi inovasi teknologi produksi gerabah. Penelitian ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses difusi inovasi pengetahuan dan teknologi produksi gerabah Kasongan, yaitu Pemerintah (Disperindagkop Kab. Bantul, Pemkab Bantul); Lembaga Pendidikan (PPP-G Kesenian Yogyakarta, ISI); Koperasi (Koperasi Setyo Bawono); serta Pengusaha dan Pengrajin Gerabah Kasongan. Survei dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam – bagi pemerintah, lembaga pendidikan, koperasi, dan beberapa tokoh pengusaha, sedangkan bagi pihak pengrajin survei dilakukan dengan metode kuesioner acak.

Dari hasil studi empirik di lapangan, ditemui bahwa, pelaku-pelaku institusi lokal yang paling berperan dalam menyebarkan inovasi pengetahuan dan teknologi produksi dapat digolongkan ke dalam empat pihak: Pemerintah – yang dalam hal ini ialah Disperindagkop; Lembaga pendidikan; Seniman serta Pengusaha dan atau Pengrajin gerabah itu sendiri. Masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda dan menjalankan proses difusi inovasi menurut proses yang beragam pula. Pihak pemerintah misalnya, terutama menjalankan difusi inovasi ke luar dan ke dalam Kasongan sebagian besar mengikuti perkembangan kebijakan yang lebih besar – atau kebijakan di atasnya, namun dalam beberapa kasus terdapat juga beberapa program yang diadakan sesuai dengan dinamika kebutuhan akan perkembangan teknologi dari perajin (bottom-up). Demikian pula dengan lembaga pendidikan, perhatian besarnya terhadap pengembangan industri gerabah Kasongan terutama muncul setelah gerabah cukup banyak mendapat tempat di dunia mode interior dan eksterior properti, sementara dorongan untuk mengembangkan industri gerabah muncul dari kebutuhan akan penelitian lembaga tersebut. Kedua pihak tersebut menyebarkan pengetahuan dan teknologi produksi dari dan ke Kasongan melalui pelatihan maupun pendampingan perajin, atau melalui promosi produk perajin ke luar wilayah..

Hal yang sangat menarik datang dari temuan mengenai peran seniman dan pengusaha retail. Seniman, pengusaha dan pengrajin mampu menyebarkan inovasi pengetahuan dan teknologi secara efektif dan menyeluruh melalui proses yang bersifat sangat terbuka. Percepatan penyebaran inovasi tersebut sangat dipengaruhi oleh rasa kekeluargaan, hubungan kekerabatan dan saling menjiplak desain dan teknologi antar pengrajin. Hasil penelitian ini ialah bahwa fenomena saling menjiplak yang digunakan pengrajin di Kasongan merupakan cara paling cepat menyebarkan pengetahuan dan teknologi produksi gerabah, akan tetapi cara ini sekaligus juga membuat pengrajin tidak mandiri. Adapun institusi lokal yang berpotensi mampu menyebarkan sekaligus membina kemandirian pengrajin ialah mekanisme penjualan secara retail sambil membangun 'brand' Kasongan yang tangguh untuk masuk dan bersaing dalam pasar global.

Kata Kunci: Institusi Lokal, Difusi Inovasi, Pengetahuan dan Teknologi Produksi, IKM Gerabah.

BAB I

PENDAHULUAN

4.1 Latar Belakang

Memasuki abad ke 21, dinamika pengembangan wilayah di Indonesia dihadapkan pada fenomena globalisasi. Kecenderungan perdagangan global, kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan sistem kemasyarakatan yang demokratis, mandiri, terbuka dan inovatif membawa dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Di satu pihak globalisasi yang diikuti dengan liberalisasi perdagangan pasti akan memberi banyak peluang bagi semua usaha di semua sektor, namun di lain pihak, perubahan sistem perdagangan tersebut juga akan menciptakan tantangan-tantangan persaingan baru - yang apabila perekonomian nasional gagal untuk menembus persaingan regional dan global, maka dapat dipastikan Indonesia akan mengalami kerugian ekonomi yang signifikan (Alkadri, 2001).

Sebagai upaya untuk menembus persaingan pasar global, Pemerintah memberlakukan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah, untuk menetapkan berbagai kebijakan, yaitu dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui otonomi daerah tersebut setiap daerah di Indonesia dituntut untuk dapat mengembangkan setiap potensi lokal yang dimilikinya agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan regional maupun global. Secara implisit, hal tersebut berarti pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal –yang merupakan faktor-faktor endogen wilayah tersebut - secara optimal. Penekanan pada pengembangan potensi lokal inilah yang membawa pembahasan penelitian ini menuju ke konsep pengembangan ekonomi lokal. Adapun Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan *“Suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas – baik kota, wilayah regional maupun kota-kota besar – yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat bekerjasama secara kolektif untuk menciptakan kondisi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan generasi yang lebih baik. Melalui proses ini diciptakan dan dikembangkan suatu budaya kewirausahaan yang dinamis, serta kesejahteraan komunitas dan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bagi semua yang berada dalam komunitas”* (World Bank, 2001).

Untuk menjawab tantangan persaingan global, pengembangan ekonomi lokal perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu

wilayah. Beranjak dari pemikiran tersebut, penelitian ini memilih sektor industri sebagai sektor yang berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi wilayah. Pilihan ini berdasarkan kecenderungan bahwa sejak akhir dasawarsa 1980-an pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar digerakkan oleh pertumbuhan industri manufaktur yang pesat (Wie, 1997)¹. Dan di antara beberapa kelompok dalam sektor industri manufaktur, pembangunan dan pertumbuhan sektor Industri Kecil dan Menengah merupakan salah satu motor penggerak yang krusial bagi perkembangan ekonomi wilayah di Indonesia. Peran besar IKM dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah tersebut terutama karena IKM di Indonesia, sektor IKM menyerap cukup banyak sumber daya yang apabila dieksploitasi secara proporsional akan dapat memberikan *multiplier effect* yang mendorong pengembangan wilayah yang signifikan. *Multiplier effect* dari sektor IKM ini terutama berasal dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak di sektor ekonomi serta kontribusinya yang besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, khususnya di daerah pedesaan dan bagi rumah tangga pedesaan (Tambunan, 2000). Dari data BPS pada tahun 1998 jumlah Industri Kecil dan Menengah tercatat sebesar 194 ribu unit lebih yang tersebar di semua subsektor manufaktur, dan merupakan bagian terbesar (99,10%) dari keseluruhan jumlah unit usaha di sektor industri manufaktur. Unit-unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tersebut menyerap 43 juta orang pekerja atau sekitar 57% dari jumlah pekerja di sektor Usaha Kecil.

Namun demikian, untuk menjadikan industri kecil dan menengah sebagai sektor dengan keunggulan daya saing perlu dipahami keterbatasan industri kecil dan menengah, yang antara lain dalam hal ukuran unit usaha dan pengembangan kapasitas modal, teknologi produksi dan pemasaran produk (Tambunan, 2002). Apabila berbicara mengenai permasalahan pengembangan unit-unit usaha IKM di Indonesia, isu-isu keterbatasan modal manusia (SDM), pengetahuan maupun teknologi produksi belum banyak dibahas secara *urgen*. Hal yang paling sering terungkap ialah keterbatasan modal fisik (finansial, struktur dan infrastruktur) dan kesulitan dalam pemasaran (Hasil kajian terhadap beberapa penelitian mengenai permasalahan IKM, 2003). Menurut Tambunan (2000), dari hasil kajiannya terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun organisasi non-profit atau LSM didapatkan bahwa keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan teknologi modern ternyata kurang diperhatikan sebagai masalah yang serius bagi banyak pengusaha di Industri Kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT). Sebaliknya dari hasil penelitiannya, keterbatasan dua faktor tersebut merupakan salah satu penyebab utama rendahnya daya saing produk IKM dari produk-produk IB (Industri Besar) atau produk-produk impor. Penelitian lain oleh Thee Kian Wie (1997) juga

¹ Sejak akhir dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia telah betumbuh dengan pesat sekali yang untuk sebagian besar telah digerakkan oleh pertumbuhan sektor industri manufaktur yang sangat pesat. Sektor industri manufaktur modern Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dengan laju pertumbuhan rata-rata setinggi hampir 12,5 persen setahun yang berarti bahwa nilai tambah riil yang dihasilkan sektor ini rata-rata telah berlipat ganda setiap enam tahun (Wie, 1997).

menyatakan bahwa “.... secara tidak langsung, kesulitan dalam pemasaran juga dapat dilihat sebagai salah satu akibat dari rendahnya kualitas pekerja dan pengusaha serta keterbatasan teknologi yang membuat produk-produk IKM belum memiliki kualitas dan harga yang kompetitif”.

Di pihak lain, upaya-upaya pengembangan IKM dari pemerintah terutama banyak dilakukan melalui bantuan permodalan, kebijakan subsidi, pelatihan maupun bantuan jalur pemasaran yang hanya bersifat “proyek” – dalam artian tidak berkelanjutan. Sebagai akibatnya, upaya-upaya tersebut banyak mengalami kegagalan secara sepihak karena kurangnya strategi pengembangan institusional yang sesuai². Fokus pada peningkatan jumlah kelangsungan perusahaan-perusahaan kecil biasanya melupakan pentingnya modal sosial yang ada pada jaringan institusional, yang dapat mempertahankan dan mengembangkan IKM melalui jaringan horisontal dan vertikal (Widyaningrum, 2003).

Berangkat dari ketidakseimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengamati bagaimana penyebaran inovasi pengetahuan (dan teknologi) produksi dikaitkan dengan modal sosial (*social capital*) yang terdapat dalam bentuk institusi lokal yang berpotensi mendorong intensitas penyebaran pengetahuan produksi ini. Menurut definisi World Bank, modal sosial merupakan “institusi, hubungan dan perilaku yang menentukan interaksi di antara orang-orang dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan sosial”. Salah satu bentuk modal sosial yang akan dibahas secara lebih rinci di sini ialah institusi lokal – yang memiliki kepentingan signifikan sebagai penyelesaian permasalahan pengembangan IKM di Indonesia. Modal sosial dalam bentuk Institusi lokal ini memiliki peran penting dalam mengatur perilaku dan tindakan organisasi maupun masyarakat baik dalam kegiatan rutin harian maupun dalam upayanya untuk mencapai tujuan tertentu – yang dalam hal ini dapat digunakan pula untuk menemukenali kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan penyebaran pengetahuan produksi dan teknologi IKM. Karena seperti yang dinyatakan oleh Romer dan Robert Lucas (1993) bahwa model-model pertumbuhan endogen – termasuk di antaranya model pengembangan pengetahuan dan atau teknologi – yang memanfaatkan modal sosial sebagai investasinya akan mengalami pengembalian modal yang semakin tinggi (berlawanan dengan *law of diminishing return*). Karena adanya *spill-over effect*, *learning by doing effect*. Semakin sering modal sosial digunakan semakin cepat modal sosial tersebut akan terakumulasi (Staveren, 2000)

² Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan AKATIGA pada tahun 2003 mengenai berbagai upaya pemerintah dalam mengembangkan IKM, ditemukan bahwa pemerintah memandang IKM sebagai unit-unit usaha yang ‘lemah’ dan perlu dibantu (misalnya melalui bantuan permodalan, pelatihan produksi, maupun pemasaran) namun pemerintah tidak memperhatikan potensi IKM untuk berorganisasi secara mandiri dan bekerjasama dengan berbagai institusi lain (misal: swasta, LSM maupun organisasi lain) dalam meningkatkan kapabilitas dan daya saingnya.